



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
K O T A K E D I R I
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kediri, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri melalui pos belanja bantuan sosial guna membiayai pelayanan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan prasejahtera;
 - b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan sosial untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di RSUD Gambiran Kota Kediri dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit

Bhayangkara Kediri, perlu diganti;

- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Kediri.

- Mengingat:
1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/11/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/11/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamkesmas Tahun 2008 ;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : *PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KEDIRI.*

BAB I

KETENTUAN UNUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Rumah Sakit adalah rumah sakk pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat yang melayani pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) maupun di luar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Kediri yang miskin dan tidak mampu.
5. Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu di Kota Kediri yang terdaftar di data base JAMKESMAS Kota Kediri.
6. Peserta Program diluar JAMKESMAS adalah masyarakat prasejahtera Kota Kediri yang bukan peserta Program

JAMKESMAS maupun peserta JAMKESMAS diluar paket pelayanan JAMKESMAS.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BALI MASYARAKAT MISKIN DAN PRASEJAHTERA

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera di Kota Kediri mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera ;
- b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang '*cost efektif* ' dan rasional ;
- c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas
- d. Transparan dan akuntabel.

B A B I I I

PENGUNAAN DANA

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera di Kota Kediri menggunakan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diperuntukkan :

- a. Pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta Program diluar JAMKESMAS, meliputi :
 1. masyarakat tergolong kategori prasejahtera yang namanya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 2. masyarakat yang tergolong kategori prasejahtera yang namanya belum tercantum dalam Keputusan Walikota;
 3. masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas seperti gelandangan, pengemis, anak tedantar (Mr X / Homeless) yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota;

dan

4. untuk pelayanan panti melalui rujukan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri.
- b. Selisih harga diluar jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan yang ada di Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) ,khusus golongan peserta JAMKESMAS;
- c. Pelayanan kesehatan dan *Attention Subject* yang meliputi: obat-obatan dan alat kesehatan untuk peserta JAMKESMAS (yang berdomisili di Kota Kediri) yang tidak dapat dibiayai melalui program JAMKESMAS (pelayanan kesehatan dan obat-obatan diluar Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS/Formularium JAMKESMAS) ;
- d. Pelayanan Hemodialise / CT Scan bagi masyarakat peserta Program diluar JAMKESMAS;
- e. Pelayanan peserta JAMKESMAS dan diluar Peserta JAMKESMAS yang dirujuk ke Rumah Sakit Type A karena ketidakmampuan / tidak adanya peralatan yang dibutuhkan di Rumah Sakit untuk melaksanakan tindakan medis yang diperlukan ;
- f. Peserta JAMKESMAS dan Peserta diluar JAMKESMAS yang sangat membutuhkan pemeriksaan laboratorium di luar fasilitas yang ada di Rumah Sakit. Misalnya : pemeriksaan PA, Urine Culture, TsHS, T3T4, Toxoplasma, dan lain - lain.
- g. Peserta JAMKESMAS dan Peserta diluar JAMKESMAS yang memerlukan yang dibutuhkan dan tidak tersedia di PMI Cabang Kota Kediri (penderita / keluarga penderita membeli sendiri kemudian kwitansi pembeliannya diserahkan ke Rumah Sakit untuk diajukan mendapatkan penggantian) ; dan
- h. Biaya transportasi rujukan dan rujukan balik pasien peserta JAMKESMAS dan peserta diluar Program JAMKESMAS dari Rumah Sakit pemberi rujukan ke Rumah Sakit yang ditunjuk.

Pasal 4

Untuk memperlancar urusan administrasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera di Kota Kediri, Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah bekerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Keqasama.

B A B I V

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan kesehatan bagi peserta, JAMKESMAS dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Program JAMKESMAS Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Standar pemberian layanan peserta Program diluar JAMKESMAS diberlakukan sebagaimana layanan bagi peserta JAMKESMAS.
- (3) Layanan kesehatan bagi peserta Program JAMKESMAS dan peserta Program diluar JAMKESMAS, dapat dilakukan di Rumah Sakit.
- (4) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS dan peserta Program diluar JAMKESMAS adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi peserta JAMKESMAS :
 1. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga;
 2. Fotokopi Kartu Peserta JAMKESMAS; dan
 3. Surat Rujukan dari pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Bagi peserta Program diluar JAMKESMAS :
 1. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga;
 2. Fotokopi Surat Keterangan Miskin dan Dinas Kesehatan Kota Kediri; dan
 3. Surat Rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

- (5) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, diberi waktu selama 2 x 24 jam hari kerja untuk mengurus kelengkapan administrasi dan apabila batas waktu yang ditentukan tidak dapat dilengkapi, maka diberlakukan seperti pasien umum serta dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Untuk mempercepat proses pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta JAMKESMAS dan peserta Program diluar JAMKESMAS, dapat menggunakan software JAMKESMAS yang telah dimodifikasi sesuai dengan keperluan layanan di Rumah Sakit.
- (7) Untuk pengajuan klaim layanan kesehatan bagi peserta JAMKESMAS dan peserta Program diluar JAMKESMAS, Rumah Sakit melampirkan rincian biaya perawatan dan pengobatan yang ditandatangani oleh masing-masing pasien penerima bantuan dan telah diverifikasi sebagai bahan pengajuan klaim ke Pemerintah Daerah. Terhadap besaran bantuan yang secara administrasi memerlukan materai, pembiayaan materai termasuk didalam belanja bantuan sosial (ditanggung APBD).
- (8) Dinas Kesehatan Kota Kediri mempersiapkan tenaga verifikator yang siap melaksanakan verifikasi di Rumah Sakit.

B A B V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan klaim oleh Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dilakukan dengan membuat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset serta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri.
- (2) Berkas pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

rekapan layanan yang diterima pasien peserta JAMKESMAS/ peserta Program diluar JAMKESMAS dan di setiap rekapan tersebut harus ditandatangani pasien dan verifikator yang ditunjuk.

- (3) Klaim dan bantuan sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan masyarakat dapat dicairkan setelah memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur (atau dengan sebutan lain) Rumah Sakit, bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Fotokopi KTP Direktur Rumah Sakit/Penanggung Jawab;
 - c. Kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri atas 1(satu) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani Direktur (atau dengan sebutan lainnya) Rumah Sakit/Penanggung Jawab;
 - d. Fotokopi rekening Bank Jatim atas Nama Rumah Sakit c.q Direktur (atau sebutan lainnya) Rumah Sakit dan atau Bendahara.

B A B V I

P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan prasejahtera Kota Kediri dengan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

B A B V I I

K E T E N T U A N P E R A U H A N

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan

prasejahtera Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini bedaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di RSUD Gambiran Kota Kediri; dan
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Maret 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A MASCHUT